



Model Strategi Peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Ciamis

Ahmad Zaenudin¹, Ading Rahman Sukmara², Nurdiana Mulyantini³
^{1,2,3} Universitas Galuh, Indonesia

Email: ading_rahman34@unigal.ac.id, dianamulya@ymail.com

Abstract: *This study aims to determine and describe the strategy model for increasing the Village Development Index (IDM) seen from environmental resilience, economic resilience, and social resilience. This study uses a qualitative descriptive method. The results of the study indicate that the strategy model for increasing the IDM from environmental resilience is still less than optimal in underdeveloped villages and developing villages. Although developing villages are better than underdeveloped villages, there are several problems such as potential disasters that have not been handled properly, especially landslides. In terms of economic resilience, developing village communities have a better diversity of livelihoods than underdeveloped villages. Access to trade facilities and financial institutions is limited in both villages, although developing villages have alternatives through BUMDes. In terms of social resilience, access to education and health in both villages is quite good, although the BPJS membership rate is still low. In terms of housing, developing villages have recorded almost equal access to clean water, sanitation, and electricity, while underdeveloped villages have not reached 100%. Access to information and communication in both villages is available, but not yet optimal.*

Keywords: *Strategy Model for Increasing the Village Development Index (IDM), Strategy Model, Environmental Resilience*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan model strategi peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) yang dilihat dari ketahanan lingkungan, ketahanan ekonomi, dan ketahanan sosial. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model strategi peningkatan IDM dari ketahanan lingkungan masih kurang optimal di desa tertinggal dan desa berkembang. Meskipun desa berkembang lebih baik dibandingkan desa tertinggal, terdapat beberapa permasalahan seperti potensi rawan bencana yang belum ditangani dengan baik, terutama bencana longsor. Dalam hal ketahanan ekonomi, masyarakat desa berkembang memiliki keragaman mata pencaharian yang lebih baik dibandingkan desa tertinggal. Akses ke sarana perdagangan dan lembaga keuangan terbatas di kedua desa, meskipun desa berkembang memiliki alternatif melalui BUMDes. Dari sisi ketahanan sosial, akses pendidikan dan kesehatan di kedua desa sudah cukup baik, meskipun tingkat kepesertaan BPJS masih rendah. Di bidang pemukiman, desa berkembang telah mencatatkan akses air bersih, sanitasi, dan listrik yang hampir merata, sementara desa tertinggal belum 100%. Akses informasi dan komunikasi di kedua desa sudah tersedia, tetapi belum maksimal.

Kata kunci: Model Strategi Peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM), Model Strategi, Ketahanan Lingkungan

1. PENDAHULUAN

Indeks Desa Membangun, atau disebut IDM, dikembangkan untuk memperkuat upaya pencapaian sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan sebagaimana tertuang dalam Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2019 – 2024 (RPJMN 2019 – 2024), yakni mengurangi jumlah Desa Tertinggal sampai 7000 Desa dan meningkatkan jumlah Desa Mandiri sedikitnya 3000 Desa pada tahun 2024. Sasaran pembangunan tersebut memerlukan kejelasan *lokus* (Desa) dan status perkembangannya. Indeks Desa Membangun tidak hanya berguna untuk mengetahui status perkembangan setiap Desa yang lekat dengan karakteristiknya, tetapi juga dapat dikembangkan sebagai

instrumen untuk melakukan targeting dalam pencapaian target RPJMN 2019 – 2024 dan koordinasi K/L dalam pembangunan Desa.

IDM lebih menyatakan fokus pada upaya penguatan otonomi Desa. Indeks ini mengikuti semangat nasional dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan desa seperti yang dinyatakan sangat jelas dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional melalui optimalisasi pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa), serta komitmen politik *membangun Indonesia dari Desa* melalui pembentukan kementerian desa (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi).

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, maksud penyusunan Indeks Desa Membangun yaitu untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri. Sedangkan tujuan penyusunan Indeks Desa Membangun adalah untuk menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa serta menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa.

Kabupaten Ciamis di bentuk dari 27 Kecamatan. 7 Kelurahan dan 258 desa, dengan luas wilayah 2.710,62km². Hal ini sudah barang tentu perlu upaya maksimal yang dilakukan pemerintah kabupaten untuk meningkatkan Indeks Desa Membangun (IDM). Berdasarkan data yang ada Kabupaten Ciamis dari 258 desa tersebut terbagi ke dalam beberapa kategori tampak sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 1
Status Desa berdasarkan penilaian IDM
di Kabupaten Ciamis Tahun 2019

No	Kategori Desa	Jumlah desa	%
1.	Mandiri	8	3.1
2.	Maju	68	26.35
3.	Berkembang	171	66.28
4.	Tertinggal	11	4.26
Jumlah		258	100.00

Sumber : Laporan Indeks Desa Membangun 2019

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa status desa mandiri di Kabupaten Ciamis hanya, 8 desa atau 3.1%, status desa Maju di Kabupaten Ciamis 68 desa atau 26.35%, status desa berkembang di Kabupaten Ciamis sebanyak 171 desa atau 66.28% dan status desa tertinggal di Kabupaten Ciamis hanya, 11 desa atau 4.26%. Hal ini

diperlukan model strategi yang tepat untuk meningkatkan Indeks Desa Membangun (IDM).

Data tersebut mengisyaratkan bahwa perlu upaya serius pihak Kabupaten Ciamis dalam pembangunan perdesaan agar dapat mendorong desa berkembang dan desa tertinggal menjadi desa maju atau desa mandiri yang sekaligus dapat meningkatkan Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Ciamis.

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ciamis untuk meningkatkan pembangunan perdesaan secara keseluruhan, melalui berbagai sektor dengan cara yang diupayakan terpadu. Pemerintah Kabupaten Ciamis sampai saat ini masih menggunakan Azas Tridaya yang intinya adalah pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi dan pendayagunaan prasarana dan sarana dalam upaya meningkatkan pembangunan perdesaan.

Selain itu juga pembangunan perdesaan dilakukan dengan konsep pembangunan kawasan perdesaan, hal ini berdasarkan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan. Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa dalam satu kabupaten/kota dalam bentuk kerja sama, pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar desa; serta bidang keamanan dan ketertiban.

Dengan berbagai upaya pembangunan perdesaan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Ciamis dan dapat meningkatkan desa berkembang dan desa tertinggal menjadi desa maju atau desa mandiri. Kabupaten Ciamis merupakan daerah yang memiliki potensi ekonomi yang cukup tinggi terutama pada sektor pertanian yang berkembang di kawasan perdesaan sehingga paradigma pembangunan ekonomi di Kabupaten Ciamis harus dititikberatkan pada keselarasan pengembangan pertanian yang kuat dengan bertumpu pada pengembangan potensi sumberdaya lokal. Selain itu, pengembangan potensi ekonomi daerah juga harus membuka ruang bagi terciptanya demokrasi ekonomi yang bertumpu pada ekonomi kerakyatan..

Pemanfaatan dan pengembangan potensi ekonomi daerah sesuai sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Ciamis merupakan salah satu kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 20019-2024 yang tercantum dalam salah satu misi pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 yaitu “Penguatan otonomi desa

dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa” dengan indikator kinerja peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Ciamis. Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Model Strategi Peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Ciamis**”

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penggunaan metode tersebut karena “Metode deskriptif merupakan metode yang memusatkan perhatian pada aspek-aspek tertentu yang sedang berlangsung pada saat penelitian dilakukan” (Surakhmad, 1994:96). Adapun tujuannya ialah “mendeskripsikan sesuatu secara sistematis, faktual dan akurat mengenai berbagai faktor serta hubungan antar fenomena yang diselidiki” (Nazir, 1983:63).

Lebih lanjut Surakhmad (1994:102) mengemukakan bahwa ciri-ciri metode deskriptif adalah: “(1) memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah-masalah aktual; dan (2) data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa”.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Model Strategi Peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) dilihat dari ketahanan lingkungan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa model strategi peningkatan Indeks Desa Membangun dilihat dari ketahanan lingkungan masih kurang maksimal pada desa tertinggal maupun desa berkembang meskipun desa berkembang lebih baik dibandingkan dengan desa tertinggal. Berdasarkan indikator kualitas lingkungan pada desa tertinggal maupun desa berkembang tidak ada pencemaran lingkungan, akan tetapi dari indikator potensi rawan bencana dan tanggap bencana diketahui pada desa tertinggal dan desa berkembang dari aspek potensi rawan bencana sama-sama memiliki potensi bencana longsor tetapi belum ada upaya untuk mengurangi dan meminimalkan terjadinya bencana longsor tersebut, selain itu dari aspek tanggap bencana desa tertinggal belum ada tanggap bencana sedangkan desa berkembang sudah ada tanggap bencana.

Hal ini menunjukkan bahwa sejauh ini Indeks Desa Membangun dilihat dari ketahanan lingkungan untuk desa tertinggal perlu ditingkatkan dalam upaya penanganan aspek potensi rawan bencana dan tanggap bencana, sedangkan untuk desa berkembang perlu ditingkatkan dalam penanganan aspek potensi rawan bencana. Upaya-upaya tersebut

bisa dilakukan dengan berbagai kegiatan untuk mengurangi resiko bencana baik melalui pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (APBD) dan pemerintah desa (APBDes) maupun pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kemampuan/kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.

Menurut Borni Kurniawan (2015:17)

Kata pembangunan menjadi diskursus yang jamak diperbincangkan manakala pemerintahan Orde baru menggalakannya. Bahkan, kata pembangunan menjadi *trade mark* kabinet pemerintahan di bawah kepemimpinan Soeharto. Pembangunan sebagai diskursus sejatinya berkaitan dengan diskursus *developmentalism* yang dikembangkan negara-negara barat. Dilihat secara mendalam, pengertian dasar pembangunan adalah istilah yang dipakai dalam berbagai konteks berbeda. Hanya saja ia lebih sering dipakai dalam konotasi politik dan ideologi tertentu. Ada yang menyetarakan pembangunan dengan perubahan sosial, pertumbuhan, modernisasi dan rekayasa sosial.

Konsep kunci pembangunan untuk memahami frasa “membangun desa” dan “desa membangun” tidak dikenal dalam wacana dan teori pembangunan. Konsep pembangunan desa sebenarnya tidak dikenal dalam literatur pembangunan. Secara historis, pembangunan desa merupakan kreasi dan ikon Orde Baru, yang muncul pada Pelita I (1969-1974) yang melahirkan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa di Departemen Dalam Negeri. Namun pada pertengahan 1980-an pembangunan desa kemudian diubah menjadi pembangunan masyarakat desa, sebab pembangunan desa sebelumnya hanya berorientasi pada pembangunan fisik, kurang menyentuh masyarakat.

Direktorat Jenderal pembangunan desa juga berubah menjadi Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa, namun arus pemberdayaan yang hadir pada tahun 1990-an nomenklatur juga berubah menjadi Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang bertahan sampai sekarang. Ditjen ini masih akrab dengan nomenklatur pembangunan desa, karena pembangunan desa tertuang dalam PP No. 72/2005. Baik RPJMN maupun institusi Bappenas dan kementerian lain sama sekali tidak mengenal pembangunan desa, melainkan mengenal pembangunan perdesaan dan pemberdayaan masyarakat (desa).

Pembangunan desa tidak lagi menjadi agenda nasional tetapi dilokalisir menjadi domain dan urusan desa. Literatur teori pembangunan juga tidak mengenal pembangunan desa, pembangunan perdesaan (rural development) yang lebih banyak dikenal dan dikembangkan. Desa maupun membangun desa menjadi bagian dari

pembangunan perdesaan. Bappenas menganut aliran dan posisi ini. Literatur pembangunan perdesaan begitu kaya, dinamis dan transformatif. Terdapat perubahan dari paradigma lama (dekade 1960-an hingga 1980-an) menuju paradigma baru (dekade 1990-an hingga sekarang). Paradigma lama bersifat *state centric*: otokratis, *top down*, sentralistik, hirarkis, sektoral dan seterusnya. Paradigma baru tampaknya mengandung spirit rekognisi dan subsidiaritas yang bersifat *society centric*: demokratis, *bottom up*, otonomi, kemandirian, lokalitas, partisipati, emansipatoris dan seterusnya.

Desa membangun adalah spirit Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-Undang Desa menempatkan desa sebagai subyek pembangunan. Pemerintah supradesa menjadi pihak yang memfasilitasi tumbuh kembangnya kemandirian dan kesejahteraan desa melalui skema kebijakan yang mengutamakan rekognisi dan subsidiaritas. Supra desa tak perlu takut dengan konsekuensi pemberlakuan kedua azas tersebut. Dengan menjadi subyek pembangunan justru desa tidak lagi akan menjadi entitas yang merepotkan tugas pokok pemerintah kabupaten, provinsi bahkan pusat. Justru desa akan menjadi entitas negara yang berpotensi mendekatkan peran negara dalam membangun kesejahteraan, kemakmuran dan kedaulatan bangsa baik di mata warga negaranya sendiri maupun negara lain. 16 Tabel 3 berikut ini berupaya menyajikan uraian secara utuh dan sistematis atas perbedaan pembangunan perdesaan (membangun desa) yang merupakan domain pemerintah dan pembangunan desa (desa membangun).

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Alifia Octavia A. Gani, Achmad Gani dan Muh. Arief (2019), dengan judul penelitian Dampak Penggunaan Dana Desa terhadap Indikator Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Ekologi/Lingkungan Desa Tertinggal Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba diperoleh kesimpulan bahwa penggunaan dana desa berpengaruh secara langsung dan signifikan pada peningkatan ketahanan sosial masyarakat desa, peningkatan ketahanan ekonomi desa dan peningkatan ketahanan ekologi/lingkungan desa.

Selain itu hasil Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eka Setyowati (2019), dengan judul penelitian Tata Kelola Pemerintahan Desa pada Perbedaan Indeks Desa Membangun (IDM): Studi Tiga Desa di Kabupaten Malang diperoleh kesimpulan bahwa Desa Tumpang yang memiliki karakteristik desa mandiri secara Indeks Desa Membangun ditinjau dari segi faktor tata kelola pemerintahan memiliki kontribusi yang besar di bidang pemerintahan dan masyarakat yang lebih partisipatif dalam kegiatan desa dibandingkan dengan dua desa yaitu Malangsuko dan Pulungdowo yang memiliki Indeks Desa Membangun (IDM) yang lebih rendah.

Model Strategi Peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) dilihat dari ketahanan ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa model strategi peningkatan Indeks Desa Membangun dilihat dari ketahanan ekonomi masih kurang maksimal pada desa tertinggal maupun desa berkembang meskipun desa berkembang lebih baik dibandingkan dengan desa tertinggal. Berdasarkan indikator keragaman produksi masyarakat desa, masyarakat desa berkembang memiliki mata pencaharian lebih beragam dibandingkan dengan desa tertinggal. Keterbukaan wilayah desa, diketahui adanya perbedaan antara desa tertinggal dengan desa berkembang, untuk desa tertinggal meskipun sudah ada trayek angkutan umum reguler ke pusat desa tetapi masih ada kondisi jalan yang belum diaspal/rabat beton sedangkan untuk desa berkembang meskipun belum ada trayek angkutan umum reguler yang ada angkutan umum non reguler tetapi kondisi jalan semuanya sudah diaspal/rabat beton sehingga dalam hal keterbukaan wilayah desa berkembang lebih terbuka wilayahnya dibandingkan dengan tertinggal. Untuk ketersediaan sarana perdagangan dan akses distribusi/logistik antara desa tertinggal dengan desa berkembang hampir sama yaitu sarana perdagangan sudah sangat memadai dan akses ke pusat perdagangan/pasar cukup dekat serta tidak ada kantor jasa logistik atau kantor pos. Sedangkan untuk akses ke lembaga keuangan dan perkreditan desa tertinggal dan desa berkembang sama-sama tidak ada Bank Umum atau BPR, ada akses penduduk ke kredit meskipun terbatas belum menjangkau semua masyarakat tetapi di desa berkembang ada alternatif lain untuk masyarakat dalam memenuhi akses perbankan dan perkreditan yaitu melalui BUMDes.

Membangun kelembagaan ekonomi lokal yang mandiri dan produktif saat ini banyak sekali tumbuh inisiatif desa membangun keberdayaan ekonomi lokal. Keberhasilan di bidang ekonomi tersebut tidak lepas dari kemampuan desa membangun perencanaan yang konsisten, partisipatif dan disepakati dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa (RPJMDesa, RKP Desa dan APB Desa).

Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi, yang pengembangannya diarahkan untuk:

1. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota

2. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan.
3. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna.
4. Pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 78 menyebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pembangunan desa mendapatkan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh M. Atshil M.A (2017) dengan judul penelitian Pengembangan Ekonomi Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran diperoleh kesimpulan bahwa adanya BUMDesa mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha yang dimilikinya. Beberapa unit usaha yang di didirikan BUMDes member peluang kepada masyarakat untuk memperoleh pekerjaan baru, serta membantu masyarakat memobilisasi potensi yang dimilikinya. Dengan adanya BUMDes memberikan motivasi dan stimulus masyarakat dalam mengembangkan usahanya guna meningkatkan pendapatan perekonomian keluarga.

Selain itu hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mir'atun Nur Arifah dan Nugrahani Kusumastuti (2017) dengan judul penelitian Strategi Mempercepat Pembangunan Desa Mandiri Studi di Desa Kemadang Gunungkidul diperoleh kesimpulan bahwa strategi yang dilakukan, pemerintah Desa Kemadang menjadi desa mandiri yaitu melakukan pemetaan potensi, pembinaan dan pendampingan, membangun sinergisitas dan menerapkan tata kelola desa menjadi organisasi modern. Sedangkan wujud dari transformasi pembangunan itu sendiri ialah terjadi peningkatan pada pelayanan, sarana dan prasarana kesehatan. Dalam keragaman produksi masyarakat dan program dalam hal mitigasi bencana juga turut meningkat

Analisis Model Strategi Peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) dilihat dari Ketahanan Sosial

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa strategi peningkatan Indeks Desa Membangun dilihat dari ketahanan sosial masih kurang maksimal pada desa tertinggal maupun desa berkembang meskipun desa berkembang lebih baik dibandingkan dengan desa tertinggal. Dilihat dari indikator modal sosial bahwa desa tertinggal dan desa berkembang masih memiliki modal sosial yaitu masih adanya solidaritas sosial (budaya gotong royong), adanya toleransi, keamanan dan ketertiban penduduk masih terjaga. Berdasarkan indikator pendidikan dan kesehatan desa tertinggal dan desa berkembang memiliki akses yang cukup dekat dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan (akses sarana pendidikan, akses sarana kesehatan dan ketersediaan tenaga kesehatan) tetapi jaminan kesehatan (tingkat kepesertaan BPJS) masih rendah. Selain itu berdasarkan indikator pemukiman cakupan akses air bersih, akses sanitasi, akses listrik masyarakat desa berkembang sudah mencapai 100% sedangkan untuk masyarakat desa tertinggal belum 100%. Untuk akses informasi dan komunikasi desa tertinggal dan desa berkembang hampir sama yaitu terdapat siaran TV, mayoritas memiliki telepon seluler dan ada akses internet tetapi belum maksimal.

Strategi pembangunan desa dilakukan dengan memadukan berbagai sektor ke dalam pembangunan desa terpadu, yang berupaya membuat semacam standarisasi tatanan kehidupan desa. Implementasi strategi pembangunan desa ini secara signifikan telah membawa perubahan, terutama dalam mobilitas fisik dan sosial orang desa. Tetapi konsep pembangunan desa semacam ini jelas-jelas tidak bermuara pada transformasi sosial desa. Karena dalam strategi pembangunan desa tersebut, Orde Baru justru tidak memperkuat institusi desa dan otonomi desa, melainkan justru melemahkan, meminggirkan dan bahkan menghancurkan otonomi desa.

Di satu sisi, menguatnya model “desa membangun” dimana inovasi, partisipasi hingga emansipasi transformasi sosial tumbuh dari bawah dan dalam desa (endogenous) adalah bagian dari ketidakberhasilan model pembangunan yang dikemukakan dari luar desa (exogenous). Tapi pada sisi yang lain, pembangunan desa yang tumbuh dari dalam menjadi pilar penting pembangunan nasional yang harus direkognisi oleh negara.

Bahkan dengan negara merekognisi prakarsa dan emansipasi lokal akan menyatukan seluruh entitas negara bangsa dalam satu konsep dan implementasi pembangunan nasional menuju kemandirian nasional. Jadi, kemandirian negara Indonesia

sejatinya terletak pada kemandirian desa-desanya sebagai entitas penyusun dan penyanggama besar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhtarom, dkk (2018) dengan judul penelitian Analisis Indeks Desa Membangun untuk mengetahui Pola Perkembangan Pembangunan Desa di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu diperoleh kesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat desa Di Gadingrejo mampu memberikan kontribusi yang positif dalam mendorong ketahanan sosial.

Menurut Jack Koteen dalam Salusu (2006:104-105) mengungkapkan bahwa ada beberapa tipe strategi yang digunakan dalam suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu: *Corporate Strategy* (strategi organisasi), *Program Strategy* (strategi program), *Resource Support Strategy* (strategi pendukung sumber daya) dan *Institutional Strategy* (strategi kelembagaan). Berdasarkan tipe strategi tersebut diatas, maka strategi yang harus dilakukan dalam meningkatkan Indeks Desa Membangun (status desa menuju desa mandiri) yaitu strategi organisasi, strategi program, strategi pendukung sumber daya dan strategi kelembagaan.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rizki Hendarji Putra (2019), dengan judul penelitian Strategi Pemerintah Desa dalam meningkatkan Status Desa Menuju Desa Mandiri (Studi Desa Danura kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran)”, diperoleh kesimpulan bahwa strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Hanura menggunakan 1). Strategi organisasi dalam perumusan visi misi serta tujuan organisasi, 2). Strategi program untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengentaskan masalah yang implikasi nya dapat dirasakan masyarakat, 3). Strategi pendukung sumber daya sebagai faktor pendukung keberhasilan program, serta; 4). Strategi kelembagaan dalam meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa untuk melaksanakan inisiatif strategi yang telah dirancang. Strategi-strategi yang dijalankan tersebut berorientasi pada peningkatan Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan dalam Indeks Desa Membangun.

Selain itu Menurut Borni Kurniawan (2015: 27) dalam buku Desa Mandiri, Desa Membangun, ada beberapa strategi dalam membangun kemandirian desa dari dalam :

1. Membangun kapasitas warga dan organisasi masyarakat sipil di desa yang kritis dan dinamis;
2. Memperkuat kapasitas pemerintahan dan interaksi dinamis antara organisasi warga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;

3. Membangun sistem perencanaan dan penganggaran desa yang responsif dan partisipatif;
4. Membangun kelembagaan ekonomi lokal yang mandiri dan produktif.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Model strategi peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) dilihat dari ketahanan lingkungan masih kurang maksimal pada desa tertinggal maupun desa berkembang meskipun desa berkembang lebih baik dibandingkan dengan desa tertinggal. Berdasarkan indikator kualitas lingkungan pada desa tertinggal maupun desa berkembang tidak ada pencemaran lingkungan, akan tetapi dari indikator potensi rawan bencana dan tanggap bencana diketahui pada desa tertinggal dan desa berkembang dari aspek potensi rawan bencana sama-sama memiliki potensi bencana longsor tetapi belum ada upaya untuk mengurangi dan meminimalkan terjadinya bencana longsor tersebut, selain itu dari aspek tanggap bencana desa tertinggal belum ada tanggap bencana sedangkan desa berkembang sudah ada tanggap bencana.
2. Model strategi peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) dilihat dari ketahanan ekonomi masih kurang maksimal pada desa tertinggal maupun desa berkembang meskipun desa berkembang lebih baik dibandingkan dengan desa tertinggal. Berdasarkan indikator keragaman produksi masyarakat desa, masyarakat desa berkembang memiliki mata pencaharian lebih beragam dibandingkan dengan desa tertinggal. Keterbukaan wilayah desa, diketahui adanya perbedaan antara desa tertinggal dengan desa berkembang, untuk desa tertinggal meskipun sudah ada trayek angkutan umum reguler ke pusat desa tetapi masih ada kondisi jalan yang belum diaspal/rabat beton sedangkan untuk desa berkembang meskipun belum ada trayek angkutan umum reguler yang ada angkutan umum non reguler tetapi kondisi jalan semuanya sudah diaspal/rabat beton sehingga dalam hal keterbukaan wilayah desa berkembang lebih terbuka wilayahnya dibandingkan dengan tertinggal. Untuk ketersediaan sarana perdagangan dan akses distribusi/logistik antara desa tertinggal dengan desa berkembang hampir sama yaitu sarana perdagangan sudah sangat memadai dan akses ke pusat perdagangan/pasar cukup dekat serta tidak ada kantor jasa logistik atau kantor pos. Sedangkan untuk akses ke lembaga keuangan dan perkreditan desa tertinggal dan desa berkembang sama-sama tidak ada Bank Umum

atau BPR, ada akses penduduk ke kredit meskipun terbatas belum menjangkau semua masyarakat tetapi di desa berkembang ada alternatif lain untuk masyarakat dalam memenuhi akses perbankan dan perkreditan yaitu melalui BUMDes.

3. Model strategi peningkatan Indeks Desa Membangun dilihat dari ketahanan sosial masih kurang maksimal pada desa tertinggal maupun desa berkembang meskipun desa berkembang lebih baik dibandingkan dengan desa tertinggal. Dilihat dari indikator modal sosial bahwa desa tertinggal dan desa berkembang masih memiliki modal sosial yaitu masih adanya solidaritas sosial (budaya gotong royong), adanya toleransi, keamanan dan ketertiban penduduk masih terjaga. Berdasarkan indikator pendidikan dan kesehatan desa tertinggal dan desa berkembang memiliki akses yang cukup dekat dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan (akses sarana pendidikan, akses sarana kesehatan dan ketersediaan tenaga kesehatan) tetapi jaminan kesehatan (tingkat kepesertaan BPJS) masih rendah. Selain itu berdasarkan indikator pemukiman cakupan akses air bersih, akses sanitasi, akses listrik masyarakat desa berkembang sudah mencapai 100% sedangkan untuk masyarakat desa tertinggal belum 100%. Untuk akses informasi dan komunikasi desa tertinggal dan desa berkembang hampir sama yaitu terdapat siaran TV, mayoritas memiliki telepon seluler dan ada akses internet tetapi belum maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwasilah, C. (2005). Pokok Kualitatif, dasar-dasar merancang dan melakukan penelitian kualitatif. Pustaka Jaya.
- Arikunto, S. (2009). Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktek. Rineka Cipta.
- Baharun, H., Enas, E., & Noviana, R. L. (2022). Quality improvement as a strategy to build pesantren's brand credibility. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 14(1), 529–538. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v14i1.1583>
- Bintoro, T. (2003). Administrasi pembangunan. LP3ES.
- Budianto, A., Darmawati Bastaman, I., & Herman, F. (2020). Promotion mix, individual internal environment, and purchase decision making in minimarket. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 21(1).
- Darna, N., Faridah, E., Lestari, M. N., & Tinia, A. G. (2024). Talent management in facing the demand of environmental changes: A study in Galuh University. *Sosiohumaniora*, 26(1), 79–85. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v26i1.47161>
- David, F. (2011). Policy analysis: Concept and practice. Prentice Hall, Inc.

- Effendy, O. U. (2007). *Human relations dan public relations*. Mandar Maju.
- Eko, et al. (2014). *Perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan atau program*. Pustaka Cakra.
- Hart, P. (1999). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Kuncoro, M. (2004). *Metode kuantitatif*. UPP AMP.
- Mulyatini, N., Herlina, E., Akbar, D. S., & Eko Prabowo, F. H. (2023). Analisis potensi pembentukan kawasan industri hasil tembakau dalam perspektif ekonomi. *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(1), 334. <https://doi.org/10.29210/020231920>
- Mulyatini, N., Herlina, E., Faridah, E., & Rozak, D. A. (1860). Human capital management model: A perspective of internal supervision in Indonesia. *Talent Development & Excellence*, 12(1), 1860–1868. <http://www.iratde.com>
- Nazir, M. (1983). *Metodologi penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Erlangga.
- Nuryani, L. K., Enas, E., Herman, M., Wahyudi, E., & Dianawati, L. (2022). Teachers' perceptions of academic supervision in a pandemic era; phenomenological review. *AL-TANZIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(3), 679–692. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v6i3.3646>
- Porter, M. E. (1996). What is strategy? *Harvard Business Review*, 74(6), 61–78.
- Sari, P., Muzaki, I. S., Mulyatini, N., Faridah, E., & Prawiranegara, B. (2019). Local own revenue, decentralization, and local financial independence. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 19(3), 250. <https://doi.org/10.25124/jmi.v19i3.2413>